

KETERBUKAAN INFORMASI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjineri dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10
Jakarta 13340, Indonesia
Telepon: (021) 8067 9200 Fax : (021) 2289 3830
www.wika.co.id
investor.relations@wika.co.id

Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi atas Serangkaian Transaksi *Share Swap* Saham PT Hotel Indonesia Properti Milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk kepada PT Hotel Indonesia Natour yang berasal dari Transaksi *Debt to Asset Swap* antara PT Wijaya Karya Realty dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2024

DAFTAR ISI

I.	UMUM.....	3
II.	INFORMASI TENTANG TRANSAKSI.....	6
III.	PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI	7
IV.	SIFAT HUBUNGAN AFILIASI.....	7
V.	PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN	8
VI.	DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN	11
VII.	PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS.....	13
VIII.	INFORMASI TAMBAHAN	14

I. UMUM

A. Umum

Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Widjaja Karja dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 1724 tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*) yang diikuti dengan perubahan status dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 29 Oktober 2007 ("**Penawaran Umum Perdana**").

Akta Anggaran Dasar sebagaimana dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor 7 tanggal 17 Januari 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003965.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

B. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan dibidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjineriing dan perencanaan, investasi dan pengelolaan usaha dibidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Kegiatan Usaha Utama:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjineriing dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur).

C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan dan berdasarkan Laporan Bulanan dari Biro Administrasi Efek Perseroan sebagaimana dalam Surat No. DE/VI/2024-1462, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100,- Per Saham	%
Modal Dasar	275.000.000.000	27.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Negara Republik Indonesia	36.291.702.781	3.629.170.278.100	91,02
2. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	3.581.361.077	358.136.107.700	8,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor setelah pelaksanaan HMETD II	39.873.063.858	3.987.306.385.800	100,00
Saham Dalam Portepel	235.126.936.142	23.512.693.614.200	-

D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

1. Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 6 Juni 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0211181 tanggal 6 Juni 2024, susunan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	:	Jarot Widyoko
Komisaris Independen	:	Adityawarman
Komisaris Independen	:	Rusmanto
Komisaris Independen	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris Independen	:	Harris Arthur Hedar
Komisaris	:	Firdaus Ali

2. Direksi

Berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 6 Juni 2024, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0211181 tanggal 6 Juni 2024, susunan susunan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	:	Agung Budi Waskito
Direktur Keuangan	:	Adityo Kusumo
Direktur Operasi I	:	Hananto Aji
Direktur Operasi II	:	Harum Akhmad Zuhdi
Direktur Manajemen Sumber daya Manusia dan Transformasi	:	Hadjar Seti Adji
Direktur Manajemen Risiko dan Legal	:	Sumadi

D. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 80/DK/WIKA/2023 tanggal 24 Juli 2023, susunan Komite Audit pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	Adityawarman
Anggota	:	Roy Journalista
Anggota	:	Rita Rufaida

E. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.02.01/A.DIR.04640/2019 tanggal 28 Mei 2019, Sekretaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Nama	:	Mahendra Vijaya
Alamat Kantor	:	Jl. D.I. Panjaitan Kav.10 Jakarta 13340, Indonesia
No. Telepon	:	(021) 8067 9200
No. Fax	:	(021) 2289 3830
Email	:	investor.relations@wika.co.id

II. INFORMASI TENTANG TRANSAKSI

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) merupakan pemegang saham PT Wijaya Karya Realty (“**WR**”) dengan kepemilikan saham Perseroan pada WR sebesar 72,51% dan WR merupakan perusahaan pengendali PT Hotel Indonesia Properti (“**HIPRO**”) dengan kepemilikan saham WR pada HIPRO sebesar 99,99%.

Dalam rangka kolaborasi perhotelan dan pariwisata, Perseroan akan melakukan 1 (satu) rangkaian transaksi yang berkesinambungan antar transaksi dengan tahapan transaksi :

1. *Debt To Asset Swap*

Perseroan akan mengambilalih/akuisisi sebesar 50,99% saham WR di HIPRO atau senilai Rp1.214.750.000.000,- (satu triliun dua ratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan skema pembayaran melalui *Debt to Asset Swap* sebagai *settlement* pembayaran pinjaman WR kepada Perseroan

2. *Share Swap*

PT Hotel Indonesia Natour (“**HIN**”) yang merupakan salah satu pemegang saham WR sebesar 22,57% akan mengambilalih/akuisisi saham HIPRO milik Perseroan sebesar 50,99% dengan skema penukaran saham (*share swap*) dalam hal ini diikuti pelepasan saham milik HIN di WR sebesar 22,57% atau senilai Rp1.214.750.000.000,- (satu triliun dua ratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Perseroan sehingga mengakibatkan penambahan kepemilikan saham Perseroan di WR yang semula 72,51% menjadi 95,08%.

(selanjutnya disebut dengan “**Transaksi**”).

Pada tanggal 25 Juni 2024 Perseroan, WR, HIN, HIPRO dan PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero) (“**INJOURNEY**”) telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Saham Bersyarat sebagai komitmen final atas skema dan nilai transaksi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), Perseroan berpendapat bahwa Transaksi ini :

1. Berdasarkan POJK 42/2020, Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi karena Perseroan merupakan pemegang saham WR sebesar 72,51%. Selanjutnya berdasarkan hubungan kepengurusan, anggota Direksi WR dan Komisaris Utama WR merupakan pegawai Perseroan. Selain itu, Perseroan dengan salah satu pemegang saham WR lainnya yaitu HIN memiliki hubungan afiliasi dikarenakan secara langsung/tidak langsung dikendalikan oleh pemegang saham utama yang sama dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia.
2. Berdasarkan POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Transaksi tidak termasuk Transaksi Material. Nilai Transaksi tersebut adalah sebesar Rp1.214.750.000.000,- (satu triliun dua ratus empat belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp9.571.613.042.000,-. (sembilan triliun lima ratus tujuh

puluh satu miliar enam ratus tigabelas juta empat puluh dua ribu Rupiah). Perbandingan antara nilai Transaksi dengan nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar 12,69% dimana nilai Transaksi tersebut tidak lebih dari 20% ekuitas Perseroan, sehingga Transaksi bukan merupakan Transaksi Material.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakini, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan, WR, HIN, HIPRO, dan INJOURNEY telah sepakat untuk menuangkan komitmen final masing-masing pihak atas skema transaksi dan nilai transaksi dalam suatu Perjanjian Pengalihan Saham Bersyarat pada tanggal 25 Juni 2024.

Adapun Transaksi yang akan dilakukan sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan 1 satu rangkaian transaksi yang berkesinambungan antar transaksi dan merupakan bagian dari kegiatan dalam rangka kolaborasi perhotelan dan pariwisata untuk memajukan sektor pariwisata Indonesia, yang dalam hal ini dilakukan melalui INJOURNEY selaku Holding Pariwisata sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) serta implementasi dari proses percepatan pembentukan *Indonesia Tourism Fund* sebagaimana telah ditetapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-282/MBU/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 *juncto* Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-68/MBU/03/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Tanggal Transaksi merupakan tanggal pada saat ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan Saham Bersyarat yaitu pada tanggal 25 Juni 2024.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

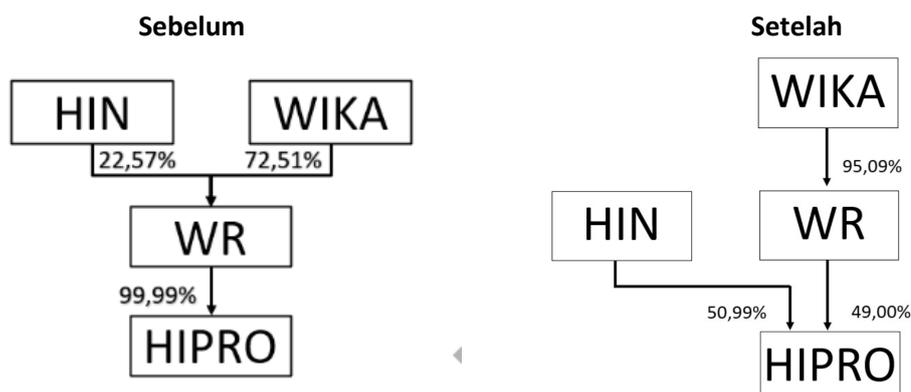
Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah sebagai upaya Perseroan untuk memperbaiki Kinerja keuangan WR. Dengan dilakukannya Transaksi maka akan meningkatkan laba, likuiditas dan menurunkan solvabilitas WR yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan serta mendukung program akselerasi industri pariwisata dan perhotelan Indonesia sehingga akan memberikan reputasi positif sebagai BUMN yang terus berkembang.

IV. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepemilikan

Perseroan dan HIN merupakan pemegang saham WR dengan kepemilikan saham pada WR masing-masing sebesar 72,51% dan 22,57%. Sedangkan HIPRO merupakan anak perusahaan terkendali WR dengan kepemilikan saham WR pada HIPRO sebesar 99,99%.

Berikut diagram kepemilikan saham sebelum dan setelah dilaksanakannya Transaksi:



Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepengurusan

Bahwa anggota Direksi WR dan Komisaris Utama WR merupakan pegawai Perseroan dan Direktur Utama HIPRO merupakan pegawai WR. Dengan demikian antara Perseroan dan WR terdapat hubungan kepengurusan.

V. PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar & Rekan (“KJPP IDR”) sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. KJPP IDR dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi menggunakan laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia). Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Share Swap Saham PT Hotel Indonesia Properti yang diperoleh dari Debt To Asset Swap PT Wijaya Karya Realty yang dimiliki PT Hotel Indonesia Natour oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang termuat dalam laporan Pendapat Kewajaran Nomor 00155/2.0118-00/BS/03/0596/1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024:

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah WIKA, WR, dan HIN dimana WIKA sebagai pemilik piutang pada WR yang akan dilakukan debt to asset swap dengan sebagian saham milik WR pada HIPRO, WR sebagai pemilik saham HIPRO yang akan membayar sebagian utang yang dimilikinya kepada WIKA dengan mengalihkan sebagian saham HIPRO miliknya dan HIN sebagai pemegang saham WR yang akan menukar saham miliknya pada WR dengan saham WIKA pada HIPRO yang diperoleh dari debt to asset swap.

2. Obyek Pendapat Kewajaran

Objek penilaian adalah rencana transaksi share swap saham HIPRO yang diperoleh dari debt to asset swap WR yang dimiliki HIN oleh WIKA. Rencana transaksi tersebut merupakan satu rangkaian transaksi yang berkesinambungan antar transaksi yang direncanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Debt to Asset Swap, dalam hal ini dalam rangka kolaborasi perhotelan dan pariwisata, WIKA akan melakukan pengambilalihan/akuisisi sebesar 50,99% saham WR di HIPRO atau senilai Rp1.214.750.000.000 dengan skema pembayaran melalui Debt to Asset sebagai settlement pembayaran pinjaman WR kepada WIKA.
2. Share Swap, dalam hal ini HIN akan melakukan pengambilalihan/akuisisi saham HIPRO milik WIKA sebesar 50,99% dengan skema melakukan penukaran saham (share swap) milik HIN di WR sebesar 22,57% kepada WIKA atau senilai Rp1.214.750.000.000 yang akan menambah kepemilikan saham WIKA di WR yang semula 72,51% menjadi 95,08%

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran (Fairness Opinion) atas rencana transaksi dengan tujuan pelaksanaan transaksi.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat independen ini, kami menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

- a. Laporan penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- b. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- h. Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Pemberi Tugas.
- i. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan.

5. Pendekatan dan Metode Transaksi

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- Melakukan analisis Transaksi
- Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi
- Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi
- Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi
- Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai transaksi debt to asset swap adalah nilai transaksi lebih rendah dari Nilai Pasarnya namun masih dalam kisaran Nilai Pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas nilai transaksi share swap saham adalah nilai transaksi lebih tinggi dari Nilai Pasarnya namun masih dalam kisaran Nilai Pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi akan menghemat pajak bunga pinjaman pemegang saham dan meningkatkan likuiditas yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan, dengan demikian sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah WIKA dapat mendukung program akselerasi industri pariwisata dan perhotelan Indonesia sehingga akan memberikan reputasi positif sebagai BUMN yang terus berkembang dan memperbaiki rasio solvabilitas WR sebagai entitas anak Perseroan memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka Kami berpendapat bahwa transaksi adalah wajar.

VI. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

PT WJAYA KARYA (Persero) Tbk dan Entitas Anak Laporan Posisi Keuangan Proforma (Rp.Juta)

Uraian	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
	31 Des 2023		31 Des 2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	3.233.071	(113.651)	3.119.420
Piutang usaha	3.310.322	(10.873)	3.299.449
Piutang retensi	1.572.096	-	1.572.096
Tagihan bruto pemberi kerja	2.463.049	-	2.463.049
Persediaan	11.411.412	(6.313)	11.405.099
Piutang yang belum ditagih	754.219	-	754.219
Piutang lain-lain - bag. lancar	299.796	83.237	383.033
Uang muka - bag. lancar	879.097	(1.363)	877.734
Jaminan usaha	342.873	-	342.873
Aset keuangan	-	-	-
Pajak dibayar dimuka	1.567.878	(279)	1.567.599
Biaya dibayar dimuka	965.398	(4.111)	961.287
Pekerjaan dalam proses	4.002.444	-	4.002.444
Jumlah Aset Lancar	30.801.656	(53.354)	30.748.302
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap	8.115.700	(2.369.988)	5.745.712
Piutang usaha - bag. tidak lancar	-	-	-
Piutang lain-lain - bag. tidak lancar	-	-	-
Piutang belum ditagih - bag. tidak lancar	-	-	-
Uang muka - bag. tidak lancar	-	-	-
Aset real estat	2.103.448	-	2.103.448
Investasi pada entitas asosiasi	1.854.701	757.862	2.612.563
Investasi pada ventura bersama	12.022.212	-	12.022.212
Properti investasi - neto	1.308.364	-	1.308.364
Aset kerjasama operasi	267.839	-	267.839
Goodwill	4.847	-	4.847
Investasi jangka panjang lainnya	1.029.675	-	1.029.675
Aset takberwujud	7.601.854	(574)	7.601.280
Aset pajak tangguhan	32.193	(8.892)	23.301
Aset lain-lain	838.747	(204.829)	633.918
Jumlah Aset Tidak Lancar	35.179.580	(1.826.421)	33.353.159
JUMLAH ASET	65.981.236	(1.879.775)	64.101.461

LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman jangka pendek	17.613.134	-	17.613.134
Utang usaha	9.339.844	(49.123)	9.290.721
Utang lain-lain	942.284	(3.916)	938.369
Utang pajak	757.471	(10.250)	747.220
Uang muka dari pelanggan jangka pendek	602.423	(23.576)	578.847
Beban akrual	5.399.695	(91.946)	5.307.749
Pendapatan diterima dimuka	294.179	(5.016)	289.162
Bagian jangka pendek dari:			
Pinjaman jangka menengah	1.545.000	-	1.545.000
Liabilitas sewa	44.130	(11.291)	32.839
Pinjaman jangka panjang	189.334	(60.138)	129.197
Obligasi	1.066.000	(50.000)	1.016.000
Sukuk mudharabah	643.800	-	643.800
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	38.437.294	(305.257)	38.132.037
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan paska kerja	269.871	(26.534)	243.337
Liabilitas pajak tangguhan	77.043	-	77.043
Uang muka dari pelanggan jangka panjang	239.959	-	239.959
Uang muka proyek jangka panjang	1.390.092	-	1.390.092
Utang lain-lain	108.252	-	108.252
Bagian jangka panjang dikurangi bagian jangka pendek:			
Pinjaman jangka menengah	235.000	-	235.000
Liabilitas sewa	110.643	(77.247)	33.396
Pinjaman jangka panjang	5.723.225	(336.433)	5.386.792
Utang ventura bersama	77.287	-	77.287
Obligasi	7.602.943	-	7.602.943
Sukuk mudharabah	2.138.015	-	2.138.015
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	17.972.329	(440.214)	17.532.115
JUMLAH LIABILITAS	56.409.623	(745.471)	55.664.152
Ekuitas			
Modal saham	896.995	-	896.995
Modal saham diperoleh kembali	(110)	-	(110)
Tambahan modal disetor	6.555.499	-	6.555.499
Perubahan ekuitas entitas anak	1.121.143	-	1.121.143
Saldo (defisit) laba	(2.823.649)	80.446	(2.743.203)
Kepentingan non pengendali	3.821.735	(1.214.750)	2.606.985
Jumlah Ekuitas	9.571.613	(1.134.304)	8.437.309
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	65.981.236	(1.879.775)	64.101.461
Rasio Likuiditas dan Solvabilitas			
<i>Current Ratio</i>	80,13%		80,64%
<i>Debt to Equity Ratio</i>	589,34%		659,74%
<i>Debt to Asset Ratio</i>	85,49%		86,84%

Berikut adalah analisis singkat atas informasi posisi keuangan proforma Perseroan per 31 Desember 2023 atas transaksi:

- Proforma aset lancar mengalami penurunan 0,17% dari Rp 30.801.656 juta menjadi Rp 30.748.302 juta.
- Proforma aset tidak lancar mengalami penurunan 5,19% dari Rp 35.179.580 juta menjadi Rp 33.353.159 juta.
- Secara keseluruhan proforma aset Perseroan setelah dilakukannya Rencana Transaksi mengalami penurunan 2,85% dari Rp 65.981.236 juta menjadi Rp 64.101.461 juta.
- Proforma liabilitas jangka pendek mengalami penurunan 0,79% dari Rp 38.437.294 juta menjadi Rp 38.132.037 juta.

- Proforma liabilitas jangka panjang mengalami penurunan 2,45% dari Rp 17.972.329 juta menjadi Rp 17.532.115 juta.
- Secara keseluruhan proforma liabilitas Perseroan mengalami penurunan 1,32% dari Rp 56.409.623 juta menjadi Rp 55.664.152 juta.
- Proforma ekuitas mengalami penurunan -11,85% dari Rp 9.571.613 juta menjadi Rp 8.437.309 juta.
- Proforma Current Ratio mengalami peningkatan dari 80,13% menjadi 80,64%.
- Proforma Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio mengalami peningkatan dari 589,34% dan 85,49% menjadi 659,74% dan 86,84%.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Juni 2024 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 42/2020;
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
3. Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
4. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Corporate Secretary

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Jl. D.I. Panjaitan Kav.10

Jakarta 13340, Indonesia

Telp. : (021) 8067 9200

Fax. : (021) 2289 3830

Email : investor.relations@wika.co.id

Situs web : www.wika.co.id

Hormat kami,
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Corporate Secretariat,



Mahendra Vijaya
Corporate Secretary